

Judul : Jangan cuma kejar untung: BUMD instrumen bangun daerah
Tanggal : Sabtu, 13 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jangan Cuma Kejar Untung BUMD Instrumen Bangun Daerah

ANGGOTA Komisi II DPR Mohamad Toha menyoroti masih terdapat perbedaan aturan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan itu kerap jadi hambatan ketika BUMD, khususnya bank daerah, ingin menjalin sinergi antardaerah.

"Jadi, ketika salah satu bank provinsi tertentu mau bersinergi dengan provinsi lain, beda aturan. Tidak bisa sinergis 100 persen," kata Toha dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Anggota Fraksi PKB itu menilai, BUMD butuh undang-undang khusus sebagai payung hukum memperkuat harmonisasi regulasi dan efektivitas pengelolaan BUMD di seluruh Tanah Air.

"Dengan regulasi seragam dan komprehensif, BUMD bisa beroperasi lebih profesional dan berkontribusi optimal bagi pembangunan daerah maupun nasional," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menambahkan, BUMD tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan. BUMD harus menjalankan fungsi pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, BUMD memiliki peran ganda. Yakni sebagai entitas bisnis yang dituntut menghasilkan profit, sekaligus sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Kalau hanya mengejar bisnis tapi tidak punya dampak ke masyarakat dan PAD, itu menjadi masalah," kata Bahtra.

Legislator Partai Gerindra itu menegaskan, BUMD, terutama bank daerah, harus jadi bagian dari solusi pembangunan daerah, bukan sekadar

lembaga komersial. Salah satu hal yang bisa dilakukan antara lain, penyaluran kredit produktif, pembiayaan bagi UMKM.

"Selain itu, dukungan dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan harus dijadikan sebagai prioritas utama," ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan, komitmen Pemerintah memperkuat peran BUMD sebagai motor ekonomi daerah dan penyedia layanan publik. Dari total 1.094 BUMD di Indonesia, sebagian di antaranya masih berada dalam kondisi tidak sehat dan membutuhkan intervensi serius.

"Kami mengevaluasi itu, padahal BUMD ini untuk menjadi pendorong ekonomi daerah dan pelayanan publik," ujar Bima.

Untuk memperbaiki kondisi itu, Pemerintah telah menyelesaikan naskah akademik RUU BUMD sebagai landasan regulasi yang lebih kokoh bagi tata kelola perusahaan daerah. RUU tersebut akan segera dibawa ke proses pembahasan di tingkat pimpinan Pemerintah dan DPR.

"Perlu peningkatan pembiayaan dan pengawasan BUMD. Karena itu, kami sudah menyelesaikan naskah akademik untuk RUU BUMD," jelas politikus PAN itu.

Selain penguatan regulasi, dia mengungkapkan rencana Pemerintah untuk membentuk direktorat jenderal khusus yang menangani pembinaan dan pengawasan BUMD secara terfokus. Pembentukan unit ini diharapkan mampu memastikan pengelolaan BUMD. ■ PYB